



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jumat, 8 Agustus 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Mantan Pj Bupati Hudiyono Ditahan

Diduga Korupsi Anggaran SMK

SURABAYA—Kejaksaa Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) melalui Bidang Tindak Pidana Khusus resmi menetapkan sekaligus menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan belanja hibah, barang/jasa, dan belanja modal untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Ta...



TERSANGKA: Mantan Pj Bupati Hudiyono (dua dari kanan) ditahan Kejati Jatim. Kedua tersangka yang ditahan adalah Hudiyono yang saat itu menjabat...

Sidak Jalan Ngingas, Subandi Targetkan Rampung Tiga Bulan



PROGRES: Bupati Sidoarjo Subandi saat merinjau pengerjaan betonisasi di Jalan Gajah Mada, Ngingas, Kecamatan Waru.

WARU-Bupati Sidoarjo, Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada pengerjaan betonisasi Jalan Gajah Mada, Ngingas, Kecamatan Waru, Rabu (27/8). Jalan sepanjang 1,7 kilometer itu tengah dibeton di tiga titik, yakni Dukuh Ngingas, Deltasari, dan Pabean. Menurut Subandi, jalan tersebut merupakan salah satu akses utama yang ramai dilalui warga, terutama pada pagi hari.

Logos for KAMIS, hbnet, HARIAN BANGSA, and HALAMAN 12.

Komisi D: Program Pembanguan Harus Ramah Disabilitas

SIDOARJO—Majelis BANGSA Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan harus ramah disabilitas. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi D DPRD Sidoarjo dengan pemangku terkait di Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (7/8/2025).

Suksesan Program MBG, Kadinkes: Berharap Berjalan Optimal

SIDOARJO—Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo kembali bertambah. Kali ini, dapur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MKG) tersebut berdir di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo. Selain sore (12/8/25), dapur SPFG itu direncanakan akan dibuka di pagi hari.

PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO Periode 2024-2029

Infographic showing the organizational structure of DPRD Sidoarjo for the 2024-2029 period, including the Chairman, Deputy Chairmen, and various committees.

Renang Bareng Belasan Hiu Paus di Perairan Sidoarjo

SIDOARJO—Sejumlah hiu paus nampak muncul ke permukaan dan berenang santai di laut Sidoarjo pada Senin (25/8) pagi. Mamalia air itu terekam sejumlah warga yang sedang bermain jetski muara Sungai Brantas Porong. "Sekitar jam sembilan pagi saya agak melihat kawan hiu muncul. Jumlahnya belasan, ukurannya besar-besar, ada yang mencapai lima meter," ungkap Weda, salah satu warga yang merekam hiu paus, kemarin (27/8). Meski berukuran raksasa, hiu paus itu tidak agresif. Bahkan, warga bisa berenang mendekati tanpa membuat kawan tersebut menjauh.

MELINTAS: Warga yang sedang bermain jetski mendekati

Sekitar jam sembilan pagi saya agak melihat kawan hiu muncul. Jumlahnya belasan, ukurannya besar-besar, ada yang mencapai lima meter," ungkap Weda, salah satu warga yang merekam hiu paus, kemarin (27/8). Meski berukuran raksasa, hiu paus itu tidak agresif. Bahkan, warga bisa berenang mendekati tanpa membuat kawan tersebut menjauh. Warga berharap kemunculan hiu paus bisa menjadi daya tarik wisata bahari Sidoarjo. "Kalau dikelola serius, ini bisa jadi pengalaman wisata eksklusif," katanya. (eza/uzi)



Polresta Komitmen Usut Tuntas Perkara 2 Oknum Wartawan Diduga Peras ASN

Sidoarjo, Pojok Kiri.—Polresta Sidoarjo menyatakan akan memberikan atensi khusus terhadap kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh dua oknum wartawan berinisial JH dan WI. Kasi Humas Polresta Sidoarjo, Iptu Tri Novi Handono mengatakan bahwa kasus dugaan pemerasan yang melibatkan insan pers Surabaya itu masih dalam penyelidikan. "Masih penyelidikan. Ditangani Pidum. Berkenan bisa konfirm baliannya (Kanit Pidum) ya," ucapnya.

Pesawat Alami Bird Strike hingga Jatuh

SEDAK—Pesawat Inter-nasional Garuda Indonesia di Bandara Juanda Sidoarjo mengalami bird strike saat lepas landas pada Rabu (27/8) malam. Pesawat Garuda Indonesia nomor 737-1001, rute Surabaya-Kuala Lumpur ditunda karena mengalami bird strike saat lepas landas. Pesawat Garuda Indonesia nomor 737-1001, rute Surabaya-Kuala Lumpur ditunda karena mengalami bird strike saat lepas landas. Pesawat Garuda Indonesia nomor 737-1001, rute Surabaya-Kuala Lumpur ditunda karena mengalami bird strike saat lepas landas.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

H. Kayan Anggota DPRD Tutup Pelatihan Batik Ecoprint Di Permisan.



Sidoarjo - inspirasiglobal.net - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Kayan, yang didapuk sebagai nara sumber menutup kegiatan pelatihan Batik Ecoprint Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif di Desa Permisan diikuti sedikitnya 25 warga Desa Permisan.

H. Kayan mengatakan, kegiatan tersebut memberikan edukasi dan mengaiarkan kepada masyarakat tentang teknik pencetakan alami. Yakni menggunakan bahan-bahan organik ramah lingkungan.

"Harapannya, melalui pelatihan ecoprint ini, para peserta, dari dari para kaum perempuan Desa Permisan dapat menggerakkan ekonomi kreatif, sekaligus membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan dan menambah penghasilan bagi masyarakat Desa Permisan" kata H. Kayan, Rabu (27/8).

Menurutnya, batik ecoprint merupakan salah satu jenis batik yang metode pembuatannya memanfaatkan pewarna alami, yakni dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga ecoprint memiliki kelebihan ramah lingkungan.

"Motifnya sangat bervariasi, unik dan eksklusif, juga menghindari bahan kimia. Selain warnanya yang terkesan sangat natural dan unik, batik ecoprint juga memiliki nilai seni dan harga jualnya yang tinggi, sehingga banyak diminati banyak orang" sebutnya.



Untuk itu, lanjut dia, upaya-upaya pengembangan sektor usaha batik ecoprint ini, tentunya sejalan dengan fungsi ekonomi kreatif yang ada.

Yakni dengan melakukan pembinaan seni kerajinan sebagai warisan budaya bangsa dan keanekaragaman etnik yang ada di tanah air.

"Kami memberikan kesempatan berusaha dan sumber pendapatan bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan kontribusi industri kerajinan dalam pembangunan nasional dan daerah," ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan inovasi dalam seni tekstil, desain fashion dan bisa menciptakan karya baru yang belum pernah ada di Kabupaten Sidoarjo

"Pelatihan ini sebagai upaya mengembangkan keterampilan seni. Sehingga sangat bermanfaat, khususnya bagi para pelaku

ekonomi kreatif yang tertarik pada bidang fashion," sebut Kavan.

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan, bahwa kita masih harus banyak belajar dan mengembangkan diri, dalam memajukan perkembangan industri kerajinan batik ecoprint. "Mulai dari meningkatkan kreativitas, kualitas, inovasi, hingga aspek publikasi dan pemasaran," ujarnya.

Lebih dari itu H. Kavan memberikan solusi kepada warga yang sudah mendapat pelajaran dan pelatihan ecoprint untuk mengembangkan usaha ecoprint dengan permodalan melalui Kurda di Bank milik daerah yakni Bank Delta Artha.

Sementara itu Kepala Desa Permisan, Mudiito menyampaikan apresiasi kepada H.Kavan sebagai anggota DPRD dan Dinas P3AKB atas digelarnya pelatihan Membatik Ecoprint di Desa Permisan

"Tentunya kami sangat berterimakasih dengan adanya pelatihan ecoprint ini, karena mengaiarkan kepada masyarakat tentang teknik pembuatan batik ecoprint secara alami menggunakan bahan-bahan organik yang ramah lingkungan," tuturnya.

Dia berharap, dengan adanya pelatihan ecoprint, masyarakat memahami dan melakukan praktik secara optimal, untuk dapat membuat batik ecoprint dengan baik dan benar.

Mudiito juga berharap, masyarakat mampu memanfaatkan secara optimal pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh para narasumber pada pelatihan ecoprint ini. (Hdk)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

H. Kayan Anggota DPRD Tutup Pelatihan Batik Ecoprint Di Permisan.



Sidoarjo - inspirasiglobal.net - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Kayan, yang didapuk sebagai nara sumber menutup kegiatan pelatihan Batik Ecoprint Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif di Desa Permisan diikuti sedikitnya 25 warga Desa Permisan.

H. Kayan mengatakan, kegiatan tersebut memberikan edukasi dan mengaiarkan kepada masyarakat tentang teknik pencetakan alami. Yakni menggunakan bahan-bahan organik ramah lingkungan.

"Harapannya, melalui pelatihan ecoprint ini, para peserta, dari dari para kaum perempuan Desa Permisan dapat menggerakkan ekonomi kreatif, sekaligus membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan dan menambah penghasilan bagi masyarakat Desa Permisan" kata H. Kayan, Rabu (27/8).

Menurutnya, batik ecoprint merupakan salah satu jenis batik yang metode pembuatannya memanfaatkan pewarna alami, yakni dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga ecoprint memiliki kelebihan ramah lingkungan.

"Motifnya sangat bervariasi, unik dan eksklusif, juga menghindari bahan kimia. Selain warnanya yang terkesan sangat natural dan unik, batik ecoprint juga memiliki nilai seni dan harga jualnya yang tinggi, sehingga banyak diminati banyak orang" sebutnya.



Untuk itu, lanjut dia, upaya-upaya pengembangan sektor usaha batik ecoprint ini, tentunya sejalan dengan fungsi ekonomi kreatif yang ada.

Yakni dengan melakukan pembinaan seni kerajinan sebagai warisan budaya bangsa dan keanekaragaman etnik yang ada di tanah air.

"Kami memberikan kesempatan berusaha dan sumber pendapatan bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan kontribusi industri kerajinan dalam pembangunan nasional dan daerah," ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan inovasi dalam seni tekstil, desain fashion dan bisa menciptakan karya baru yang belum pernah ada di Kabupaten Sidoarjo

"Pelatihan ini sebagai upaya mengembangkan keterampilan seni. Sehingga sangat bermanfaat, khususnya bagi para pelaku

ekonomi kreatif yang tertarik pada bidang fashion," sebut Kavan.

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan, bahwa kita masih harus banyak belajar dan mengembangkan diri, dalam memajukan perkembangan industri kerajinan batik ecoprint. "Mulai dari meningkatkan kreativitas, kualitas, inovasi, hingga aspek publikasi dan pemasaran," ujarnya.

Lebih dari itu H. Kavan memberikan solusi kepada warga yang sudah mendapat pelajaran dan pelatihan ecoprint untuk mengembangkan usaha ecoprint dengan permodalan melalui Kurda di Bank milik daerah yakni Bank Delta Artha.

Sementara itu Kepala Desa Permisan, Mudiito menyampaikan apresiasi kepada H.Kavan sebagai anggota DPRD dan Dinas P3AKB atas digelarnya pelatihan Membatik Ecoprint di Desa Permisan

"Tentunya kami sangat berterimakasih dengan adanya pelatihan ecoprint ini, karena mengaiarkan kepada masyarakat tentang teknik pembuatan batik ecoprint secara alami menggunakan bahan-bahan organik yang ramah lingkungan," tuturnya.

Dia berharap, dengan adanya pelatihan ecoprint, masyarakat memahami dan melakukan praktik secara optimal, untuk dapat membuat batik ecoprint dengan baik dan benar.

Mudiito juga berharap, masyarakat mampu memanfaatkan secara optimal pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh para narasumber pada pelatihan ecoprint ini. (Hdk)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidak Betonisasi Bringinbendo, Bupati Subandi : Diharapkan redam banjir dan Rampung Desember



Sidoarjo, centralberitanews.com – Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada proyek betonisasi di dua tempat sekaligus, Rabu, (27/8/2025) Siang. Sidak pertama dilakukan pada betonisasi Jalan Bringinbendo Sidodadi, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman. Proyek betonisasi jalan sepanjang 2.250 meter dengan lebar 4 meter itu, saat ini telah masuk progres pengerjaan saluran U-Ditch di sisi kanan dan kiri.

Pembangunan jalan yang menghubungkan akses Desa Bringinbendo – Desa Kletek ini | ditargetkan selesai dalam 150 hari kerja atau pada 18 Desember 2025. Saat ini, progresnya baru mencapai sekitar 7 persen.



Bupati Subandi menegaskan, betonisasi jalan di Bringinbendo dapat menjadi solusi persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Ia juga meminta warga yang terdampak pembangunan untuk bersabar.

"Dengan adanya betonisasi dan saluran U-Ditch, kita harapkan genangan air yang selama ini menjadi keluhan warga bisa teratasi. Proyek ini membutuhkan waktu, karena itu kami minta masyarakat bersabar. InsyaAllah manfaatnya akan segera dirasakan," ujar Subandi.

Subandi juga meminta agar lurah atau kepala desa hingga camat serta Dinas PU Bina Marga untuk terus mengawasi agar kualitas betonisasi sesuai dengan harapan dan selesai tepat waktu.

"Saya minta mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala dinas PU Bina Marga mengawasi dengan ketat agar selesai sesuai harapan baik waktu dan kualitas betonisasinya," tegasnya.

Selanjutnya Bupati Sidoarjo, Subandi bergeser ke proyek betonisasi ruas jalan Pabean-Ngingas Kecamatan Waru. Ruas jalan dengan panjang 1,7 km itu telah masuk segmen tiga atau yang terakhir pengerjaannya. Bupati optimis betonisasi ruas jalan Pabean-Ngingas selesai sebelum masa kontrak pengerjaannya berakhir tanggal 18 Desember 2025 besok.

"Kalau kita lihat pengerjaannya hari ini, kita optimis bisa selesai tepat waktu, ini saja pengerjaannya surplus 3 persen,"ucapnya.

Kepala Desa Bringinbendo, Soleh Dwi Cahyono, menyambut baik perhatian Pemkab Sidoarjo terhadap kebutuhan infrastruktur desanya. Menurutnya, jalan ini merupakan jalur vital antar wilayah sekaligus bagian dari upaya mengurangi banjir di desanya.

"Warga tentu menantikan jalan yang lebih baik. Dengan adanya betonisasi ini, akses lebih lancar dan masalah banjir yang sering terjadi bisa teratasi," kata Soleh. (Dew/git/Yu/mas)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KAMIS
28 AGUSTUS 2025

fb.net
Website Resmi Harian Bangsa

HARIAN
BANGSA

BANGSAONLINE.COM
Cepat, Logis, dan Akurat

HALAMAN 12



DPRD Sidoarjo Dorong Pemkab Segera Terapkan Perda Disabilitas

Komisi D: Program Pembangunan Harus Ramah Disabilitas

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat segera menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Komisi D DPRD Sidoarjo menegaskan, melalui perda tersebut, semua program dan kebijakan pembangunan di Kota Delta berpihak dan ramah terhadap penyandang Disabilitas. Penegasan ini terungkap saat hearing Komisi D dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan sejumlah organisasi penyandang Disabilitas, Kamis, 14 Agustus 2025.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch Dhamroni Chudlori menyatakan, Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas jangan hanya jadi 'angin surga', namun harus benar-benar diimplementasikan.

Ja menyebut, saat ini masih banyak sarana publik di Sidoarjo yang belum ramah terhadap para penyandang Disabilitas. Ia menyebut misalnya sarana toilet, belum ramah Disabilitas. "Ini harus menjadi evaluasi

menyeluruh, termasuk dalam perencanaan. Ruang Kelas Baru (RKB) juga harus ramah Disabilitas," tandasnya.

Dhamroni pun memberikan banyak catatan agar nantinya perda ini benar-benar diterapkan, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satunya penerimaan siswa Disabilitas di sekolah umum. "Ini harus disosialisasikan tidak hanya ke pihak sekolah, siswa, namun juga ke wali siswa," pinta politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dengan perda tersebut, kata Dhamroni, pemerintah harus hadir dengan segala fasilitas dan sarana-prasarana, karena hal tersebut merupakan urusan wajib. Kewajiban tersebut, diantaranya mengakomodir untuk para penyandang Disabilitas bekerja di sebuah perusahaan.

Dalam hearing ini, Komisi D juga menegaskan komitmennya untuk mengatasi persoalan terbatasnya jumlah guru pendamping khusus, yang mendampingi siswa Disabil-



Hearing Komisi D DPRD Sidoarjo dengan pihak terkait membahas pendidikan inklusif, di gedung DPRD Sidoarjo, 14 Agustus 2025.

foto: Mustain/HARIAN BANGSA

itas. Yakni bakal mengalokasikan dana melalui skema pokok pikiran (Pokir) anggota Komisi D.

"Kami punya keinginan urunan, masing-masing Rp 100 juta, maka dengan 12 orang di Komisi D, terkumpul Rp 1,2 miliar untuk program tersebut di tahun 2026," tandas Dhamroni yang lantas disambut tepuk tangan para peserta hearing.

kan bahwa program dan kebijakan pembangunan di Sidoarjo inklusif dan berpihak pada penyandang disabilitas. "Mohon segera disosialisasikan Perda Nomor 11 tahun 2024, agar ini bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan untuk semua OPD harus ramah Disabilitas," tegasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan agar OPD konsisten dalam menerapkan pembangunan yang ramah Disabilitas. Ia berharap pemerintah daerah memastikan dan berkoordinasi dalam memberikan layanan Disabilitas.

Dijelaskan Bangun, tidak kalah pentingnya, penyandang Disabilitas juga membutuhkan layanan kesehatan gratis yang tengah dijalankan pemerintah. Disabilitas seharusnya menjadi prioritas yang harus dilayani nomor satu dan tidak boleh lagi ada penolakan. "Ini akan kami koordinasikan dengan Dinkes dan BPJS Kesehatan," tandasnya.

Anggota Komisi D Tarkit Erdianto meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo menyusun data secara konkrit terkait jumlah siswa Disabilitas di Kota Delta. Sehingga nantinya data

itu bisa dipakai untuk menghitung kebutuhan sarana-prasarana dan fasilitas penyandang lainnya.

"Murid Disabilitas mulai SD hingga SMP di Sidoarjo ada berapa? Silahkan dibuka, karena ini nanti menyangkut anggaran yang dibutuhkan. Seperti contoh kecil toilet untuk anak Disabilitas, trap jalan yang kadang abai untuk anak Disabilitas harus diperbaiki dan lain sebagainya," tegas politisi PDI-Perjuangan ini.

Anik Puspitasari dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sidoarjo menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam hearing bersama Komisi D tersebut. Diantaranya perlu adanya alokasi anggaran khusus untuk pendidikan Inklusif, baik dari APBN maupun APBD.

Kata Anik, juga perlu dukungan dana untuk sekolah di Kota Delta yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif. "Perlu ada assessment di awal tahun ajaran untuk bisa memberikan dukungan akomodasi yang layak bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan disediakan di sekolah. Perlu adanya pendataan terpadu terkait pendidikan penyandang Disabilitas," tandas Anik. (sta/adv)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim

Anggaran Bedah Warung Tahun Depan Naik Jadi Rp 10 Juta

SIDOARJO - Anggaran program bedah warung rakyat tahun depan bakal naik. Dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta tiap warung.

Kenaikan itu disampaikan Bupati Sidoarjo saat sidak program bedah warung di Desa Kletek, Kecamatan Taman, kemarin (27/8). "Kami ingin warung-warung rakyat ini lebih berdaya saing. Tahun depan anggaran kita naikan, agar usaha mikro kecil menengah semakin kuat dan bisa menghidupi keluarganya," ujar Subandi.

Selain bantuan, Subandi juga menyoroti keluhan pelaku usaha kecil terkait kebutuhan modal. Ia menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo membuka

akses pinjaman modal dengan plafon Rp 5 juta hingga Rp 50 juta, bunga ringan hanya 2 persen per tahun. "Silakan dimanfaatkan, ini kesempatan baik bagi UMKM. Jika bunga 2 persen pertahun, maka perbulan hanya 0,16 persen," jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo Edi Kurniadi, menyebut program bedah warung rakyat ini berjalan efektif membantu masyarakat kecil. "Warung-warung rakyat bisa lebih rapi, layak, dan mampu menarik lebih banyak pembeli. Tahun depan peningkatan bantuan menjadi Rp 10 juta tentu akan semakin mendorong UMKM naik kelas," jelasnya. (eza/uzi)



DIPERBAIKI: Salah satu warung di Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, kemarin (27/8). Warung itu masuk dalam program bedah warung tahun ini.

Jawa Pos

583 Siswa SD dan 260 Murid MI di Sidoarjo Putus Sekolah

Karena Faktor Ekonomi dan Kurangnya Kesadaran Orang Tua

SIDOARJO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo mencatat ada 583 anak SD yang tidak sekolah. Meski jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Sidoarjo menunjukkan tren penurunan, angka kasus di jenjang sekolah dasar (SD) masih cukup tinggi.

Kabid Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Netti Lastiningsih menyebut, jumlah tersebut sudah berkurang dibanding tahun lalu yang mencapai 935 anak. "Penurunan memang signifikan, tapi 500-an anak di SD yang belum sekolah itu masih angka yang besar," ujarnya.



Penurunan memang signifikan, tapi 500-an anak di SD yang belum sekolah itu masih angka yang besar."

Netti Lastiningsih
Kabid Mutu Pendidikan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Sidoarjo

Dari 583 anak tersebut, sebanyak 204 *drop out* dari sekolah. Sedangkan, 379 lulus SD tapi tidak melanjutkan sekolah.

Turun Signifikan

Sementara itu di MI mengalami penurunan ATS signifikan. Pada tahun 2024 ada 1.718



WAJIB BELAJAR: Siswa SDN Candipari 2 masuk sekolah kemarin (27/8). Masih ada ratusan anak SD dan MI putus sekolah di Sidoarjo.

anak tidak sekolah karena *drop out* dan lulus tapi tidak melanjutkan. Sedangkan tahun ini hanya 260 anak.

Menurutnya, Dinas Dikbud Sidoarjo sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah ATS di tingkat SD. Di

antaranya dengan pendataan *by name by address*, pemberian beasiswa, serta monitoring rutin ke sekolah-sekolah.

Namun, sejumlah kendala masih ditemui di lapangan. Mulai dari faktor ekonomi keluarga, hingga minimnya ke-



TUNTASKAN WAJIB BELAJAR

- Jumlah ATS SD 2025: **583 anak**
Tahun sebelumnya 935 anak
- Jumlah ATS MI 2025: **260 anak**
Tahun sebelumnya 1.718 anak

Upaya Dikbud Sidoarjo:

- Pendataan *by name by address*
- Pemberian beasiswa
- Monitoring rutin ke sekolah

Sumber: Dinas Dikbud Sidoarjo

sadaran orang tua akan pentingnya pendidikan lanjutan setelah SD. "Harapan kami, tidak ada lagi anak usia SD yang tidak sekolah. Mereka semua berhak mendapat kesempatan belajar," ujarnya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS • KAMIS 28 AGUSTUS TAHUN 2025 | HALAMAN 18



Truk Terguling di Tol sampai Tutup Satu Lajur

SIDOARJO - Insiden truk terguling kembali terjadi di jalan tol kemarin (27/8). Kejadiannya di kilometer 754. Kecelakaan itu sempat menyumbat arus lalu lintas karena posisi truk yang menutup satu lajur.

Kanit PJR Jatim 2 AKP Tutud Yudho Prastyawan menjelaskan, truk terguling karena mengalami pecah ban belakang. Mahfud, 41, pengemudinya, langsung kehilangan kendali. "Truk

saat kejadian melaju di lajur kiri dengan kecepatan sedang," ungkapnya.

Truk itu, lanjutnya, oleng ke kanan dan langsung terguling. Yudho menyebut pengemudinya tidak sampai terluka parah. Tetapi, imbasnya menghambat lalu lintas.

Dia menambahkan, truk langsung dievakuasi dengan mobil derek. Jajarannya membantu pengaturan lalu lintas selama proses berlangsung. Yudho mengimbau masyarakat selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum digunakan. "Untuk mengantisipasi kejadian serupa," katanya. (edi/uzi)

HAMBAT ARUS:

Truk yang terguling akibat pecah ban belakang di jalan tol Sidoarjo kilometer 754 kemarin (27/8). Tidak ada korban, namun lalu lintas macet.

DOC. PIR JATIM 2

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Eks Kades Trosobo Divonis Tiga Tahun

Terbukti Lakukan Pungli Program PTSL

SIDOARJO - Eks Kades Trosobo Heri Achmadi dinilai majelis hakim terbukti melakukan pungutan liar (pungli) program pendaftaran tanah sistematis (PTSL). Dia dihukum tiga tahun penjara. Vonis itu dibacakan majelis

BERSALAH: Eks Kades Trosobo Heri Achmadi (kiri) setelah sidang di pengadilan tipikor, Selasa (26/8). Dia divonis tiga tahun oleh majelis hakim.

hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (26/8).

Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suarditha menyatakan, Heri terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa. Selain penjara, dia diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider 6 bulan penjara. "Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 67,2 juta subsider 1 tahun penjara," katanya.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Heri sebelumnya dituntut 4 tahun penjara. Suarditha menerangkan,

tindak pidana itu dilakukan pada 2023. Menurut dia, pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum. Adapun yang memberatkan, Heri dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Heri belum mengambil sikap atas putusan itu. Dia menyatakan pikir-pikir. Jaksa setali uang dengannya. "Mandatkan waktu yang sudah ditentukan undang-undang untuk mengambil keputusan," kata Suarditha sebelum menutup sidang. (edi/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓
DELTASIANA

Renang Bareng Belasan Hiu Paus di Perairan Sidoarjo

SIDOARJO - Sejumlah hiu paus nampak muncul ke permukaan dan berenang santai di laut Sidoarjo pada Senin (25/8) pagi. Mamalia air itu terekam sejumlah warga yang sedang bermain jetski muara Sungai Brantas Porong.

"Sekitar jam sembilan pagi saya kaget melihat kawanan hiu muncul. Jumlahnya belasan, ukurannya besar-besar, ada yang mencapai lima meter," ungkap Weda, salah satu warga yang merekam hiu paus, kemarin (27/8). Meski berukuran raksasa, hiu paus itu tidak agresif. Bahkan, warga bisa berenang mendekati tanpa membuat kawanan tersebut menjauh.

Warga berharap kemunculan hiu paus bisa menjadi daya tarik wisata bahari Sidoarjo. "Kalau dikelola serius, ini bisa jadi pengalaman wisata eksklusif," katanya. (eza/uzi)



WEDA UNTUK JAWA POS

MELINTAS: Warga yang sedang bermain jetski mendekati sejumlah hiu paus di perairan Sidoarjo pada Senin (25/8). Kemunculan hiu itu bisa jadi daya tarik wisata.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Polresta Komitmen Usut Tuntas Perkara 2 Oknum Wartawan Diduga Peras ASN

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Polresta Sidoarjo menyatakan akan memberikan atensi khusus terhadap kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh dua oknum wartawan berinisial JH dan WI.

Kasi Humas Polresta Sidoarjo, Iptu Tri Novi Handono mengatakan bahwa kasus dugaan pemerasan yang memalukan insan pers Surabaya itu masih dalam penyelidikan.

“Masih penyelidikan. Ditangani Pidum. Berkenan bisa confirm beliaunya (Kanit Pidum) ya,” ucapnya.

Kanit Pidum Polresta Sidoarjo Iptu Patria saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus ini menyatakan komitmennya akan menangani kasus ini sampai selesai. “Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta dari kejadian tersebut, dan kami berkomitmen akan melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan sampai tuntas. Kami atensikan pak,” tutur Patria saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Selasa (26/08/25).

Diberitakan sebelumnya, dua oknum wartawan Surabaya, dimana salah satunya yaitu kontributor stasiun televisi milik BUMN dilaporkan atas kasus dugaan pemerasan terhadap seorang ASN berinisial RR.

Laporan tersebut diajukan oleh Andry Ermawan yang merupakan pengacara korban. Mantan kuasa hukum Anies Baswedan itu melaporkan kedua oknum wartawan tersebut lantaran telah berbuat hal yang tidak pantas dilakukan seorang insan pers.

Tak hanya kerugian materiil, Andry menilai nama baik kliennya itu turut dipertaruhkan sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ketua DPC IKADIN Sidoarjo itu mengaku pelaporan itu atas dasar bukti-bukti yang kuat. (sw)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Mantan Pj Bupati Hudiyono Ditahan

■ Diduga Korupsi Anggaran SMK

SURABAYA-Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) melalui Bidang Tindak Pidana Khusus resmi menetapkan sekaligus menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan belanja hibah, barang/jasa, dan belanja modal untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Ta-



TERSANGKA: Mantan Pj Bupati Hudiyono (dua dari kanan) ditahan Kejati Jatim.

hun Anggaran 2017. Penetapan dilakukan Selasa (26/8) malam, setelah proses penyidikan panjang.

Kedua tersangka yang ditahan adalah Hudiyono, yang saat itu menjabat

● Ke Halaman 10

Mantan Pj Bupati...

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendidikan Jatim dan kemudian pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, serta Jember mengendali penyedia atau pihak

ketiga. Hudiyono menjabat sebagai Pj Bupati Sidoarjo mulai Oktober 2020 hingga Februari 2021.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Windhu Sugiarto, menjelaskan, penetapan ini dilakukan setelah penyidik memerik-



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

sa lebih dari 130 saksi, melakukan serangkaian penggeledahan, serta menyita sejumlah barang bukti dari berbagai lokasi terkait.

"Penetapan tersangka merupakan hasil pengumpulan alat bukti yang cukup, termasuk gelar perkara yang dilakukan secara cermat dan hati-hati. Para tersangka resmi ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini," ujar Windhu di Surabaya, Selasa (26/8).

Dugaan korupsi ini bermula dari

proyek peningkatan sarana dan prasarana SMK yang dibiayai dari tiga pos anggaran: belanja hibah Rp 78 miliar, belanja modal alat/konstruksi Rp 107,8 miliar, dan belanja pegawai serta lainnya Rp 759 juta.

Berdasarkan hasil penyidikan, saat itu Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman mengenalkan JT kepada Hudyono sebagai pihak pelaksana kegiatan. JT kemudian diduga menyusun harga barang dan spesifik

kasi tanpa memperhatikan kebutuhan riil sekolah penerima. Barang-barang yang dikirim bukan berdasarkan analisis lapangan, melainkan dari stok yang sudah tersedia.

"Proses pengadaan dilakukan melalui lelang yang dikondisikan agar perusahaan milik JT menjadi pemenang. Akibatnya, banyak barang yang dikirim tidak sesuai kebutuhan sekolah sehingga tidak dapat dimanfaatkan," jelas Windhu. (sur/gun)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



FOTO-FOTO: SURYANTORADAR SURABAYA

GERAK CEPAT: Maskapai Udara Air tipe Boeing 737-300 dengan nomor penerbangan UDA001 rute Surabaya–Kuala Lumpur disimulasikan mengalami bird strike sesaat setelah lepas landas.

Pesawat Alami Bird Strike hingga Jatuh

■ Simulasi Keadaan Darurat di Bandara Juanda

SEDATI-Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo menggelar Airport Emergency Exercise 2025, Rabu (27/8). Dalam latihan ini, sebuah pesawat maskapai Udara Air tipe Boeing 737-300 dengan nomor penerbangan UDA001 rute Surabaya–Kuala Lumpur disimulasikan mengalami bird strike sesaat setelah lepas landas. Akibat kejadian tersebut, mesin



SIGAP: Pengamanan di bandara Juanda oleh anggota Kopaska.

nomor 2 mati sehingga pilot memutuskan kembali ke Bandara Juanda atau Return to Base (RTB). Namun,

pada jarak 6 nautical mile dari landasan pacu, kedua mesin pesawat

● Ke Halaman 10



Pesawat Alami...

mengalami kegagalan (dual engine failure) dan akhirnya pesawat disimulasikan jatuh di sektor H6.

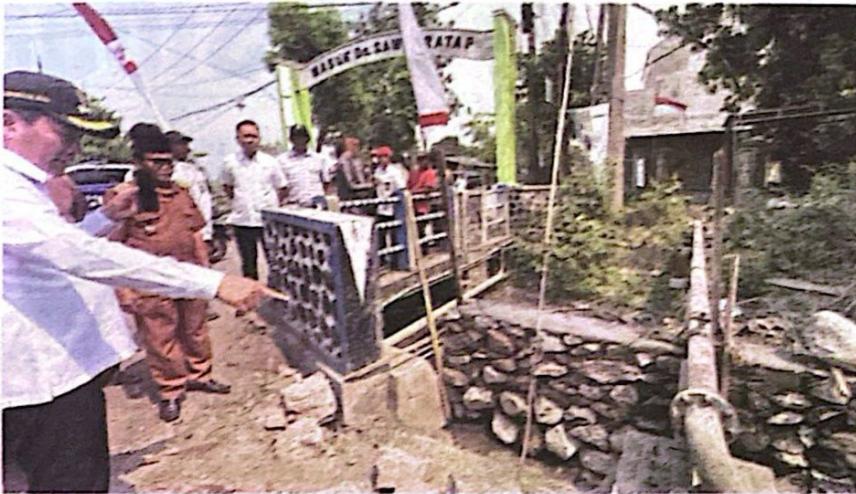
Tim Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) yang sudah siaga langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman api sekaligus mengevakuasi penumpang. Sesuai prosedur, Emergency Operation Center (EOC) segera diaktifkan dengan melibatkan seluruh unsur komite penanggulangan keadaan darurat.

Dari hasil simulasi, evakuasi penumpang menghasilkan data: 54 orang mengalami luka berat, 81 orang luka sedang, 135 orang luka ringan, dan 90 orang meninggal dunia.

General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, menjelaskan bahwa latihan ini merupakan bentuk komitmen bandara dalam memastikan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan menghadapi kondisi darurat, khususnya kecelakaan pesawat udara.

Latihan ini dilakukan sesuai standar International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI. "Latihan ini dilakukan untuk memastikan jika keadaan darurat sungguhan terjadi, semua pihak telah memiliki prosedur, keterampilan, dan koordinasi yang mumpuni demi melindungi keselamatan penumpang dan awak pesawat," jelas Tohir. (sur/vga)

Sidak Jalan Ngingas, Subandi Targetkan Rampung Tiga Bulan



M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

PROGRES: Bupati Sidoarjo Subandi saat meninjau pengerjaan betonisasi di Jalan Gajah Mada, Ngingas, Kecamatan Waru.

WARU-Bupati Sidoarjo, Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada pengerjaan betonisasi Jalan Gajah Mada, Ngingas, Kecamatan Waru, Rabu (27/8). Jalan sepanjang 1,7 kilometer itu tengah dibeton di tiga titik, yakni Dukuh Ngingas, Deltasari, dan Pabean.

Menurut Subandi, jalan tersebut merupakan salah satu akses utama yang ramai dilalui warga, terutama pada pagi hari.

● Ke Halaman 10



Sidak Jalan Ngingas,...

Banyak pengguna jalan yang melintas menuju Bandara Internasional Juanda melewati jalur ini. "Akses di sini benar-benar padat, apalagi di jam sibuk pagi hari. Karena itu, perbaikan jalan ini sangat mendesak," ujarnya.

Bupati menargetkan pengerjaan betonisasi dapat rampung dalam waktu tiga bulan. Ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama Asisten

II Setda Sidoarjo mengawal langsung jalannya proyek.

Selain betonisasi, proyek ini juga meliputi penataan jalan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta jaringan listrik di sepanjang ruas jalan.

"Sejauh ini progres berjalan lancar. Hingga kemarin, realisasi fisik sudah mencapai sekitar tiga persen," jelasnya.

Subandi menekankan pentingnya pengawasan agar pekerjaan tidak terlambat dan hasilnya sesuai standar.

Konsultan pengawas diminta memastikan kualitas betonisasi benar-benar terjamin.

Selain perbaikan, proyek ini juga mencakup pelebaran jalan. Lebar jalan yang semula empat meter akan ditambah satu meter dari bahu jalan, sehingga total menjadi lima meter.

"Lebarinya bertambah sekitar satu meter. Harapannya, setelah rampung, arus lalu lintas di jalur ini bisa lebih lancar," pungkas Subandi. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO

Periode 2024-2029



H. ABDILLAH HASIH, S.M. H. SUYARNO, S.H., MM. H. KAYAN, SH. H. WARIN ANDONO, S.H.



Dhamroni Chudori
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo



Bangun Winarso
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo



Tarkit Erdianto
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo



EVALUASI: Hearing Komisi D DPRD Sidoarjo dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Komisi D DPRD Sidoarjo Dorong Evaluasi Pagu Sekolah, Pastikan SPMB Lebih Baik

SIDOARJO-Polemik kelebihan pagu siswa di sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Sidoarjo, seperti yang terjadi di SDN Candipari II dan SDN Kesambi, menuai perhatian serius dari Komisi D DPRD Sidoarjo. Komisi yang membidangi pendidikan itu mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo segera melakukan evaluasi serupa tidak lagi terulang pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tahun mendatang.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudori, menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, kelebihan pagu bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain itu, kebijakan pemindahan siswa secara tiba-tiba juga telah menimbulkan keresahan di kalangan orang tua. "Masalah ini jelas memengaruhi psikologis anak dan kekecewaan wali murid. Banyak orang tua sudah mengeluarkan biaya untuk seragam, iuran sekolah, bahkan anak-anak sudah mengikuti proses belajar sejak awal. Namun akhirnya mereka harus dipindahkan ke sekolah lain hanya karena persoalan administrasi," ujarnya.

Dhamroni menegaskan, pendidikan adalah kebutuhan mendasar yang tidak boleh dipermasalahkan dalam bentuk apa pun. Ia mencontohkan, SDN Candipari II pada dasarnya hanya memiliki kuota penerimaan 28 siswa. Namun, saat pelaksanaan SPMB bulan Juli lalu, sekolah tersebut menerima hingga 42

siswa. Akibatnya, 14 siswa terpaksa dipindahkan ke sekolah terdekat sesuai aturan.

"Pemindahan ini memang bukan drop out, tapi tetap saja menimbulkan kegelisahan. Anak-anak tetap bersekolah, hanya administrasinya yang dipindahkan. Namun, yang harus kita pikirkan adalah dampak psikologisnya terhadap anak dan wali murid," jelasnya.

Menurut Dhamroni, permasalahan tersebut murni terjadi akibat kelemahan sistem penerimaan. Ia menilai, kepala sekolah kurang memahami aturan teknis SPMB serta tidak melakukan antisipasi jika jumlah pendaftar melebihi pagu.

"Kalau sejak awal sudah terlihat anironya besar, kepala sekolah bisa mengajukan tambahan rombongan belajar (rombel). Itu jauh lebih bijak daripada me-

nyalahkan aturan lalu memindahkan siswa setelah mereka telah masuk," katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, juga menyoroti hal serupa. Menurutnya, kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Sekolah, kata Bangun, seharusnya bisa membaca animo masyarakat sejak awal proses pendaftaran.

"Jika peminatnya tinggi, sekolah bisa mengajukan tambahan pagu dan rombel kepada Dispendikbud. Justru, animo masyarakat itu bisa dijadikan indikator bahwa sekolah negeri masih mendapat kepercayaan luas," terangnya.

Bangun juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani siswa terdampak. Menurutnya, anak-anak harus merasa tetap dihargai meski harus dipindahkan ke sekolah lain.

"Psikologis anak perlu dijaga. Jangan sampai mereka merasa

dikucilkan atau berbeda dengan teman-temannya. Orang tua juga perlu mendampingi agar anak tetap tenang dan percaya diri," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menyampaikan keprihatinannya atas kasus ini. Menurutnya, Dispendikbud Sidoarjo seharusnya lebih teliti dalam memetakan kebutuhan sekolah serta mengantisipasi potensi kelebihan pagu.

"Kami bisa memahami kekecewaan wali murid dan kebingungan pihak sekolah. Tapi, seharusnya sejak awal keterbatasan kuota itu disampaikan dengan jelas. Jika memang ada kelebihan, sekolah bisa mengajukan tambahan rombel, bukan menerima dulu lalu memindahkan belakangan," tegasnya.

Tarkit menilai, wajar jika banyak orang tua keaget dengan kebijakan pemindahan ini. Apalagi, keputusan diambil secara mendadak se-

telah anak-anak menjalani proses belajar. Meski begitu, ia tetap bersyukur semua anak masih bisa melanjutkan pendidikan.

"Prinsipnya jangan sampai anak-anak menjadi korban. Mereka tidak boleh diperlakukan diskriminatif, apalagi sampai ada kasus perundungan karena dianggap berbeda," ucapnya.

Lebih jauh, Tarkit menyebutkan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan di Sidoarjo. Selama empat periode dirinya duduk di DPRD, baru kali ini ia menemukan kasus siswa harus dipindahkan secara mendadak akibat persoalan kuota.

"Saya berharap kasus ini menjadi yang pertama dan terakhir. Ke depan, komunikasi antara sekolah, dinas, dan masyarakat harus lebih intensif, sehingga masalah serupa tidak terjadi lagi," pungkasnya.

● Ke Halaman 10



Komisi D DPRD Sidoarjo...

Komisi D DPRD Sidoarjo sepakat untuk terus mengawal proses evaluasi SPMB yang akan dilakukan oleh Dispendikbud. Evaluasi ini nantinya tidak hanya menyangkut aturan teknis penerimaan, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur sekolah, jumlah tenaga pendidik, hingga pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah.

Dengan begitu, setiap anak di Sidoarjo bisa memperoleh hak pendidikan yang sama tanpa ada diskriminasi maupun perlakuan yang merugikan.

Kasus kelebihan pagu di Sidoarjo

memang menjadi catatan penting. Di satu sisi, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri menunjukkan masih tingginya kepercayaan publik. Namun di sisi lain, hal itu juga menuntut pemerintah daerah lebih responsif menyediakan fasilitas dan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Harapannya, tahun depan SPMB bisa berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih manusiawi. Semua pihak, baik sekolah, dinas, maupun orang tua, perlu bersinergi demi menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas di Kabupaten Sidoarjo. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Dhamroni Chudlori
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo



Bangun Winarso
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo



Tarkit Erdianto
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo



EVALUASI: Hearing Komisi D DPRD Sidoarjo dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Komisi D DPRD Sidoarjo Dorong Evaluasi Pagu Sekolah, Pastikan SPMB Lebih Baik

SIDOARJO-Polemik kelebihan pagu siswa di sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Sidoarjo, seperti yang terjadi di SDN Candipari II dan SDN Kesambi, menuai perhatian serius dari Komisi D DPRD Sidoarjo. Komisi yang membidangi pendidikan itu mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo segera melakukan evaluasi menyeluruh, agar peristiwa serupa tidak lagi terulang pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tahun mendatang.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, kelebihan pagu bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain itu, kebijakan pemindahan siswa secara tiba-tiba juga telah menimbulkan keresahan di kalangan orang tua.

"Masalah ini jelas memengaruhi psikologis anak dan kekecewaan wali murid. Banyak orang tua sudah mengeluarkan biaya untuk seragam, iuran sekolah, bahkan anak-anak sudah mengikuti proses belajar sejak awal. Namun akhirnya mereka harus dipindahkan ke sekolah lain hanya karena persoalan administrasi," ujarnya.

Dhamroni menegaskan, pendidikan adalah kebutuhan mendasar yang tidak boleh dipermainkan dalam bentuk apa pun. Ia mencontohkan, SDN Candipari II pada dasarnya hanya memiliki kuota penerimaan 28 siswa. Namun, saat pelaksanaan SPMB bulan Juli lalu, sekolah tersebut menerima hingga 42

siswa. Akibatnya, 14 siswa terpaksa dipindahkan ke sekolah terdekat sesuai aturan.

"Pemindahan ini memang bukan drop out, tapi tetap saja menimbulkan kegelisahan. Anak-anak tetap bersekolah, hanya administrasinya yang dipindahkan. Namun, yang harus kita pikirkan adalah dampak psikologisnya terhadap anak dan wali murid," jelasnya.

Menurut Dhamroni, permasalahan tersebut murni terjadi akibat kelemahan sistem penerimaan. Ia menilai, kepala sekolah kurang memahami aturan teknis SPMB serta tidak melakukan antisipasi jika jumlah pendaftar melebihi pagu.

"Kalau sejak awal sudah terlihat anominya besar, kepala sekolah bisa mengajukan tambahan rombongan belajar (rombel). Itu jauh lebih bijak daripada me-

nyalahi aturan lalu memindahkan siswa setelah mereka telanjur masuk," katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, juga menyoroti hal serupa. Menurutnya, kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Sekolah, kata Bangun, seharusnya bisa membaca animo masyarakat sejak awal proses pendaftaran.

"Jika peminatnya tinggi, sekolah bisa mengajukan tambahan pagu dan rombel kepada Dispendikbud. Justru, animo masyarakat itu bisa dijadikan indikator bahwa sekolah negeri masih mendapat kepercayaan luas," terangnya.

Bangun juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani siswa terdampak. Menurutnya, anak-anak harus merasa tetap dihargai meski harus dipindahkan ke sekolah lain.

"Psikologis anak perlu dijaga. Jangan sampai mereka merasa

dikucilkan atau berbeda dengan teman-temannya. Orang tua juga perlu mendampingi agar anak tetap tenang dan percaya diri," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menyampaikan keprihatinannya atas kasus ini. Menurutnya, Dispendikbud Sidoarjo seharusnya lebih teliti dalam memetakan kebutuhan sekolah serta mengantisipasi potensi kelebihan pagu.

"Kami bisa memahami kekecewaan wali murid dan kebingungan pihak sekolah. Tapi, seharusnya sejak awal keterbatasan kuota itu disampaikan dengan jelas. Jika memang ada kelebihan, sekolah bisa mengajukan tambahan rombel, bukan menerima dulu lalu memindahkan belakangan," tegasnya.

Tarkit menilai, wajar jika banyak orang tua keaget dengan kebijakan pemindahan ini. Apalagi, keputusan diambil secara mendadak se-

telah anak-anak menjalani proses belajar. Meski begitu, ia tetap bersyukur semua anak masih bisa melanjutkan pendidikan.

"Prinsipnya jangan sampai anak-anak menjadi korban. Mereka tidak boleh diperlakukan diskriminatif, apalagi sampai ada kasus perundungan karena dianggap berbeda," ucapnya.

Lebih jauh, Tarkit menyebutkan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan di Sidoarjo. Selama empat periode dirinya duduk di DPRD, baru kali ini ia menemukan kasus siswa harus dipindahkan secara mendadak akibat persoalan kuota.

"Saya berharap kasus ini menjadi yang pertama dan terakhir. Ke depan, komunikasi antara sekolah, dinas, dan masyarakat harus lebih intensif, sehingga masalah serupa tidak terjadi lagi," pungkasnya.

● Ke Halaman 10



Komisi D DPRD Sidoarjo...

Komisi D DPRD Sidoarjo sepakat untuk terus mengawal proses evaluasi SPMB yang akan dilakukan oleh Dispendikbud. Evaluasi ini nantinya tidak hanya menyangkut aturan teknis penerimaan, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur sekolah, jumlah tenaga pendidik, hingga pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah.

Dengan begitu, setiap anak di Sidoarjo bisa memperoleh hak pendidikan yang sama tanpa ada diskriminasi maupun perlakuan yang merugikan.

Kasus kelebihan pagu di Sidoarjo

memang menjadi catatan penting. Di satu sisi, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri menunjukkan masih tingginya kepercayaan publik. Namun di sisi lain, hal itu juga menuntut pemerintah daerah lebih responsif menyediakan fasilitas dan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Harapannya, tahun depan SPMB bisa berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih manusiawi. Semua pihak, baik sekolah, dinas, maupun orang tua, perlu bersinergi demi menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas di Kabupaten Sidoarjo. (sai/vga)



Pemkab Resmikan Dapur SPPG

Sukseskan Program MBG, Kadinkes : Berharap Berjalan Optimal

SIDOARJO - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo kembali bertambah. Kali ini, dapur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut berdiri di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo. Senin sore, (25/8/25), dapur SPPG itu diresmikan oleh Pemkab Sidoarjo.

Setiap harinya, dapur SPPG Magersari yang dikelola Yayasan Perempuan Semangat Garuda ini memproduksi 4 ribu porsi makanan. Ribuan porsi makanan bergizi, beragam, dan seimbang tersebut didistribusikan kepada siswa di sejumlah sekolah di Kecamatan Sidoarjo, mulai dari TK Magersari, SDN Magersari hingga SMPN 1 dan 2 Sidoarjo.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhmie Herawati, yang hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi saat peresmian, berharap program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan optimal. Pemkab Sidoarjo kata dia, siap mendukung program. Presiden Prabowo tersebut. Kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk meningkatkan program peningkatan



Kadinkes resmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo

gizi anak-anak itu sukses.

"Program MBG tidak hanya bisa dilakukan pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah daerah juga dibutuhkan untuk memastikan program ini berjalan

maksimal," ucapnya.

Ia menambahkan, keterlibatan Yayasan Perempuan Semangat Garuda merupakan salah satu bentuk kolaborasi pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo. Dapur

SPPG Magersari, jelasnya, dipersiapkan dengan standar ketat, mulai sarana, prasarana, SDM, hingga tata kelola. Hal itu wajib dipatuhi agar tidak muncul permasalahan saat makanan didistribusikan ke

siswa. Bahkan, penjamah makanan diwajibkan memiliki sertifikat pelatihan khusus untuk memastikan keamanan pangan.

"Kami meminta seluruh pengelola dapur memperhatikan aturan yang berlaku. Perlengkapan dan alur kerja wajib dipatuhi agar tujuan pemberian gizi terbaik bagi anak-anak dapat berjalan baik," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Perempuan Semangat Garuda, Rahmawati, Rabu (27/8/25) menyampaikan bahwa dapur MBG yang dikelolanya akan melayani 4 ribu paket makanan setiap hari. Sekitar 20 juru masak terlibat dalam pengolahan makanan, bekerja lima hari dalam seminggu untuk menyajikan menu sehat dalam wadah stainless steel.

Ia berharap program MBG di Kabupaten Sidoarjo mampu menjaga kesehatan sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.

"Saya melihat sendiri banyak anak berangkat sekolah tanpa sarapan. Melalui program MBG, anak-anak bisa mendapat asupan bergizi langsung di sekolah," ucapnya. ● Loe

Editor : Imam Ghazali Layouter : Yudhi

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Opini

Jawa Pos • KAMIS 28 AGUSTUS TAHUN 2025 | HALAMAN 2

Kementerian Haji, Harapan Jemaah

PEMERINTAH baru saja menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah seiring dengan pengesahan Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Keputusan itu memunculkan pertanyaan penting: Apakah kementerian baru itu sekadar formalitas politik atau benar-benar dapat meningkatkan pelayanan ibadah umat?

Secara simbolis, keberadaan kementerian tersebut menandai prioritas pemerintah terhadap urusan keagamaan. Selama ini, penyelenggaraan haji menjadi bagian dari Kementerian Agama (Kemenag), yang meski memiliki Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah, masih dirasakan kurang optimal dalam koordinasi dan layanan. Dengan kementerian khusus, pemerintah menunjukkan keseriusan dan perhatian khusus terhadap ibadah yang menyentuh jutaan warga Indonesia setiap tahun.

Integrasi Fungsi

Namun, simbolisme semata tidak cukup. Nilai tambah kementerian baru akan terlihat dari kemampuan meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji dan umrah. Kementerian harus mampu menjadi *one-stop service*, mengintegrasikan fungsi yang sebelumnya tersebar. Mulai pembinaan, perlindungan, hingga pengawasan dan penataan biaya. Tanpa desain organisasi yang efektif, kementerian baru bisa menjadi beban birokrasi dan anggaran tambahan tanpa dampak nyata bagi jemaah.

Makna sosial kementerian juga layak diperhatikan. Haji bukan sekadar ritual, melainkan simbol identitas umat Islam Indonesia, solidaritas sosial, dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak beribadah warganya. Kementerian khusus memberikan peluang untuk menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi



Oleh: **Danang Purwanto**

Dosen Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta

dan berbasis kemanfaatan jemaah. Ini penting karena kualitas pelayanan haji menyangkut kepuasan spiritual dan psikologis jemaah, bukan sekadar administratif.

Selain itu, kementerian baru membuka peluang modernisasi dan inovasi layanan publik. Fokus tunggal pada haji dan umrah mendorong digitalisasi pendaftaran, pembayaran dan manajemen jemaah, mempermudah komunikasi, serta memastikan transparansi biaya. Modernisasi itu penting untuk generasi muda yang lebih melek teknologi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Namun, tantangan nyata tetap ada. Jika kementerian baru hanya menjadi instrumen politik atau formalitas struktural tanpa inovasi nyata dalam pelayanan, dampaknya bakal minimal. Desain kementerian harus menekankan peran fungsional dibandingkan struktural, penguatan kapasitas pegawai, pengawasan internal, serta tata kelola berbasis data. Jika tidak, kementerian justru menambah birokrasi dan pembengkakan anggaran.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar langkah administratif, melainkan cerminan ambisi pemerintah: apakah ingin menambah struktur birokrasi semata atau benar-benar menjadi pionir pelayanan ibadah yang modern.*

Pembentukan kementerian juga memiliki implikasi simbolis lebih luas dalam konteks politik identitas dan legitimasi sosial. Ia memberikan sinyal bahwa pemerintah menempatkan urusan spiritual warga negara sebagai prioritas strategis sekaligus mencerminkan sensitivitas terhadap aspirasi

masyarakat yang menekankan kualitas ibadah. Jika diiringi kebijakan nyata, simbolisme itu bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, menunjukkan negara hadir untuk melayani umat, tidak sekadar mengelola administrasi.

Diplomasi Religius

Keberhasilan Kementerian Haji dan Umrah akan diukur bukan dari jumlah pejabat atau struktur, melainkan dari dampak nyata terhadap pengalaman jemaah: keamanan perjalanan, kepastian biaya, kenyamanan fasilitas, dan efisiensi birokrasi. Kementerian ini juga bisa menjadi model reformasi birokrasi berbasis fungsi yang diterapkan pada layanan publik lain di Indonesia.

Selain itu, kementerian baru berpotensi meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi religius internasional. Dengan koordinasi yang lebih terpusat dan profesional, pemerintah bisa lebih efektif bernegosiasi dengan kuota, fasilitas, dan prosedur haji sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan je-

negara peduli pada aspek spiritual dan kesejahteraan warganya. Itu dapat menjadi instrumen untuk membangun solidaritas sosial, memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa, dan menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya dalam urusan administratif, tetapi juga dalam pengalaman hidup yang sakral.

Prediksi jangka panjang juga menarik untuk dicermati. Kementerian baru dapat menjadi laboratorium reformasi birokrasi: memadukan struktur fungsional, digitalisasi layanan, dan pendekatan manusiawi bagi jemaah. Jika berhasil, model itu bisa diterapkan untuk layanan publik lain seperti pendidikan, kesehatan, atau administrasi kependudukan.

Namun, kegagalan dalam desain organisasi atau implementasi dapat berakibat pada pemborosan anggaran, birokrasi berlapis, serta ketidakpuasan publik – yang justru akan merusak simbolisme yang ingin dibangun.

Akhirnya, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar langkah administratif. Ia menjadi cermin ambisi pemerintah: apakah ingin menambah struktur birokrasi semata atau benar-benar menjadi pionir pelayanan ibadah yang modern, aman, dan nyaman. Keberhasilan kementerian itu akan menegaskan bahwa simbolisme birokrasi dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi umat, menjadikan ibadah haji bukan hanya ritual spiritual, melainkan pengalaman layanan publik yang tertata, manusiawi, dan membanggakan.

Pembentukan kementerian tersebut, jika dijalankan dengan desain organisasi yang tepat, juga bisa menjadi warisan kebijakan yang berdampak bagi generasi mendatang. Dengan kata lain, simbolisme kementerian itu hanya akan bermakna jika bisa menyeimbangkan aspek politik, administratif, dan pelayanan publik secara nyata. (*)



MENULIS OPINI

Panjang tulisan maksimal 650 kata. Kirim ke: opini_jp@jwapos.co.id. Sertakan nomor rekening, NPWP, salinan KTP, foto, dan nomor telepon. Naskah-naskah yang sudah lima hari di redaksi dan tidak lermuat otomatis dianggap kembali ke pengirim. (*)

Pembaca Menulis

Paving Amh... 11 D...

Jawa Pos

Bhirawa

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pahing, 28 Agustus 2025

Halaman 8

Ketua PWRI Sidoarjo : Uang Pensiun, Uang PNS yang Dipotong



Acara pembubaran panitia peringatan HUT PWRI ke 63 tahun 2025 oleh PWRI Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Bhirawa

Panitia peringatan HUT Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) ke 63 tahun 2025, dari PWRI Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan syukur acara tahunan ini telah berjalan lancar dan sukses.

Ketua PWRI Sidoarjo, MG Hadi Sucipto mengaku meski dalam proses, ada lika-liku dan rona-rona yang harus dialami oleh para panitia. Mengomentari tentang pensiunan PNS ada yang bilang membebani APBN?

Menurut mantan pejabat eselon II B di Pemkab Sidoarjo itu, komentar itu dinilai kurang pas. Sebab selama menjadi pegawai PNS, ada iuran untuk hari tua saat pensiun dan iuran lainnya.

"Gaji kita dipotong dan dikelolah PT Taspen, kita percayakan kepada PT Taspen untuk mengelolah dana itu, untuk dikelolah

dan dikembangkan PT Taspen," komentar Pak Cip, panggilan akrab dari MG Hadi Sucipto, Rabu (28/8) kemarin, disela-sela acara penutupan panitia peringatan HUT PWRI Tahun 2025.

"Kok dianggap membebani negara? Insha Allah itu uang PNS sendiri, yang selama ini dikembangkan oleh PT Taspen," lanjutnya.

Menurut pak Cip yang juga pernah menjadi Wakil Bupati Sidoarjo itu, kadang-kadang suatu pernyataan bisa keselo omong. Tetapi nyatanya, hingga saat ini uang pensiun yang diterima mantan pensiunan baik dari PNS dan

TNI/Polri tidak ada masalah. Para pensiunan masih bisa tetap menikmati setiap bulannya.

Jumlah pensiunan PNS yang berada di Kabupaten Sidoarjo, menurut Hadi Sucipto bisa mencapai 20 ribu lebih. Mereka berasal dari Sidoarjo, dan luar kota. Tetapi pada saat pensiun, mereka tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Setiap bulan, para pensiunan itu mengambil uang pensiun mereka ke sejumlah bank mitra pensiunan. Seperti BTN, BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Jatim, Kantor Pos dan sebagainya.

"Saat ini para pensiunan masih bisa menerima uang pensiun, mungkin komentar itu salah ngomong saja," lanjut Pak Cip.

Dalam Bulan Oktober atau November 2025 mendatang, di Kabupaten Sidoarjo, kata Pak Cip

akan ada kegiatan Muskab PWRI untuk memilih pimpinan para wredatama atau pensiunan di Kabupaten Sidoarjo.

Pak Cip menyerahkan kepada anggota PWRI Sidoarjo untuk memilih sesuai hati nurani masing-masing. Dirinya mempersilahkan kepada anggota PWRI Sidoarjo bila ingin mencalonkan diri. Apa dirinya siap dipilih kembali? Menurutnya kalau masih dipercaya kembali akan maju. Dirinya siap saja. Dan kondisinya sama dengan yang lain, yakni sama-sama pensiunan.

"Senang dengan lembaga ini, kita bisa kumpul-kumpul bareng, sama-sama sudah pensiunan, dengan sering silaturahmi insya Allah akan bisa berkah kesehatan, keselamatan dan umur," tandasnya. [kus.fen]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ih

Jawa Pos | HALAMAN 3

KEMENDIKDASMEN

Minta Tambahan Anggaran Rp 14,4 Triliun

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang taman kanak-kanak (TK). Bantuan ini ditujukan bagi murid dari keluarga tidak mampu.

Rencana tersebut mendorong Kemendikdasmen kembali meminta tambahan anggaran dalam RAPBN 2026. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (26/8), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan dana sebesar Rp 14,4 triliun.

"Dengan pagu anggaran Rp 55 triliun, masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat terbiayai. Oleh karena itu kami mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar Rp 14,4 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Kemendikdasmen telah memperoleh pagu indikatif Rp 33,5 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp 55 triliun. Bahkan pada rapat



PIP untuk anak TK ini baru kita usulkan di tahun anggaran 2026. Sebagai komitmen kami untuk pelaksanaan wajib belajar 13 tahun."

Abdul Mu'ti

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

mengusulkan tambahan Rp 71,11 triliun sehingga total anggaran mencapai Rp 104,76 triliun.

Tambahan anggaran 2026 kali ini difokuskan pada penyesuaian satuan biaya PIP SD dan SMP, serta perluasan ke jenjang TK. Untuk PIP SD, satuan biaya diusulkan naik dari Rp 450 ribu menjadi Rp 600 ribu per siswa per tahun. Sedangkan PIP SMP meningkat dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1

juta per siswa per tahun.

Adapun PIP TK direncanakan sebesar Rp 450 ribu per siswa per tahun. "Ya, PIP untuk TK ini baru kita usulkan di tahun anggaran 2026, sebagai komitmen kami untuk pelaksanaan wajib belajar 13 tahun," tegas Mu'ti.

Hitung Ulang Jumlah Sasaran

Ia menambahkan, jumlah sasaran PIP TK akan dihitung ulang, dengan fokus penerima tetap murid dari keluarga tidak mampu.

Selain PIP, tambahan anggaran juga diprioritaskan untuk insentif guru non-ASN, yang naik dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pendidik.

Dana tambahan juga akan digunakan untuk memperluas program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, terutama sekolah rusak. Pemerintah menargetkan standar pelayanan minimum bidang pendidikan bisa segera tercapai. (mia/all)

Jawa Pos